

# **RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**



**DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN WONOSOBO**

## **Kata Pengantar**

Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2024 merupakan terjemahan dari Renstra tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan tahun 2024 dengan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sebagai dasar pemikiran untuk menentukan target dan indikator untuk tahun 2024 serta memperhatikan usulan dari masyarakat (*participatory approach*). RENJA tahun 2024 juga mengacu kepada visi misi bupati tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2024.

Rencana kerja ini bersifat indikatif sehingga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan aturan maupun kebijakan yang baru dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

## DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Dasar Hukum .....	1
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
	1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 .....	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo .....	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo .....	16
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan .....	18
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO .....	26
	3.1. Telaan terhadap Kebijakan Nasional .....	26
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan .....	27
	3.3. Program dan Kegiatan .....	28
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABAUPATEN WONOSOBO ...	88
BAB V	PENUTUP .....	120

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2024 merupakan terjemahan dari Renstra tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan tahun 2024 dengan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sebagai dasar pemikiran untuk menentukan target dan indikator baru untuk tahun 2024 serta memperhatikan usulan dari masyarakat (*participatory approach*). RENJA tahun 2024 juga mengacu kepada visi misi bupati tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 serta untuk mensinergikan pembangunan tahun 2023 dengan memperhatikan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023,

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 \_Bab I I-6 Indonesia Nomor 5606);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional, menentukan arah kebijakan pada urusan pangan, pertanian dan perikanan serta untuk mewujudkan sinergitas dan keselarasan dalam menentukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan urusan pangan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2024 adalah :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
- b. Menentukan strategi untuk mengelola keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
- c. Memudahkan dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan;

- d. Menggambarkan kebijakan kinerja yang akan ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penyusunan.

##### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022**

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; analisi kinerja pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo; review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO**

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional; tujuan dan sasaran Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan serta program dan kegiatan.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO**

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024.

##### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dari Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo berdasarkan target Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 tersaji pada Lampiran Tabel 1.



**Tabel. 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	09									
2	09	02								
2	09	02	01							

2	09	0201	03	0	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	5 unit		1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	20,00
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Ketersediaan pangan per kapita per hari (kilo kalori)</b>	<b>3.050,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>33.144,00</b>	<b>1.142,90</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>96,39</b>
						<b>Persentase cadangan pangan utama (beras)</b>	<b>265,00</b>	<b>2265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>104,11</b>	<b>39,29</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00</b>
2	09	0301	20	0	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>									
2	09	0301	20	0	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	5 running text		2,00	2,00	100,00	1,00	1,00	20,00
2	09	0301	20	0	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	5 KRPL		3,00	3,00	100,00	1,00	1,00	20,00
2	09	0302	20	0	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>									
2	09	0302	20	0	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/ Kota	10 ton beras		6,00	6,50	108,33	8,00	8,00	80,00

2	09	03	204		<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>									
2	09	03	204	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	5 dokumen		1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	20,00
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase desa berstatus rawan pangan</b>	<b>26,00</b>	<b>49,00</b>	<b>47,00</b>	<b>21,51</b>	<b>154,23</b>	<b>47,00</b>	<b>43,00</b>	<b>165,38</b>
2	09	04	201		<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>									
2	09	04	201	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	5 dokumen		1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	40,00
2	09	04	202		<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>									
2	09	04	202	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	20 kali		4,00	4,00	100,00	4,00	6,00	30,00
2	09	04	202	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada	5 paket		1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80,00

						kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota									
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>05</b>				<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase bahan pangan ASUH (aman, sehat, utuh dan halal)</b>	<b>95,00</b>	<b>88,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,20</b>	<b>100,22</b>	<b>92,00</b>	<b>91,00</b>	<b>95,79</b>
2	09	05	2	0		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>									
2	09	05	2	0	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	30 rekomendasi				6,00	6,00	20,00	
2	09	05	2	0	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	25 paket		5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	20,00
<b>3</b>	<b>25</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Pertumbuhan produksi perikanan tangkap</b>	<b>3,25</b>	<b>0,31</b>	<b>2,40</b>	<b>5,27</b>	<b>219,58</b>	<b>2,80</b>	<b>5,27</b>	<b>162,15</b>

3	25	0	2		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>									
3	25	0	2	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	3 paket					1,00	1,00	33,33
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Persentase kelompok tani ikan yang aktif</b>	<b>85,00</b>	<b>68,20</b>	<b>70,00</b>	<b>53,88</b>	<b>76,97</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>92,94</b>
						<b>Persentase UPR aktif</b>	<b>88,46</b>	<b>83,65</b>	<b>84,62</b>	<b>83,65</b>	<b>64,10</b>	<b>85,58</b>	<b>74,00</b>	<b>83,65</b>
						<b>Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan</b>	<b>6,00</b>	<b>(21,49)</b>	<b>(2,00)</b>	<b>0,58</b>	<b>290,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>33,33</b>
						<b>Pertumbuhan produksi perikanan budidaya</b>	<b>3,60</b>	<b>3,10</b>	<b>3,20</b>	<b>4,07</b>	<b>127,19</b>	<b>3,30</b>	<b>3,50</b>	<b>97,22</b>
3	25	0	2		<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>									
3	25	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 kelompok					7,00	5,00	50,00

3	25	0 4	2 0 2	0 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	10 kelompok					2,00	2,00	20,00
3	25	0 4	2 0 2	0 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	7 kelompok					1,00	1,00	14,29
3	25	0 4	2 0 4		<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>									
3	25	0 4	2 0 4	0 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudi dayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	10 paket					2,00	2,00	20,00

3	25	04	20	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	17 paket					3,00	3,00	17,65
<b>3</b>	<b>27</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									
3	27	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100,00</b>	<b>N/ A</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
						<b>Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja</b>	<b>100,00</b>	<b>N/ A</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
						<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100,00</b>	<b>N/ A</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	27	01	20	02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>									
3	27	01	20	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan pegawai	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
3	27	01	20	06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>									
3	27	01	20	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00

3	27	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
3	27	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
3	27	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
3	27	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan makan dan minuman rapat	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
						Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
3	27	01	207		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>									100,00
3	27	01	207	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel kantor	5 paket					1,00	1,00	20,00
3	27	01	208		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>									

3	27	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
3	27	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, air, listri	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
3	27	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
3	27	01	209		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>									
3	27	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan. pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
3	27	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan perakatan dan mesin	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00

3	27	01	209	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penataan ruang pertemuan Penataan ruang tamu dan resepsionis	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Produksi tanaman pangan</b>								
						- Padi	162.226,00	148.934,58	161.966,00	134.910,00	83,30	162.016,00	162.016,00	99,87
						- Jagung	80.179,00	49.364,89	74.008,00	43.860,60	59,26	75.488,00	75.488,00	94,15
						- Ubi kayu	158.954,00	121.362,57	144.055,00	89.662,11	62,24	146.936,00	146.936,00	92,44
						- Ubi jalar	18.956,00	13.982,35	16.355,00	15.493,41	94,73	17.009,00	17.009,00	89,73
						<b>Produksi tanaman hortikultura</b>								
						- Bawang putih	3.763,90	1.538,50	3.511,60	2.392,11	68,12	3.581,80	3.581,80	95,16
						- Kentang	53.683,90	47.370,90	53.425,50	61.785,70	115,65	53.478,90	53.478,90	99,62
						- Kubis	58.974,90	55.883,96	58.681,00	49.276,50	83,97	58.739,60	58.739,60	99,60
						- Sawi	11.029,40	9.371,70	10.879,00	8.595,40	79,01	10.928,80	10.928,80	99,09
						- Bawang daun	36.213,60	36.918,50	36.102,50	26.119,1	72,35	36.132,00	36.132,00	99,77





						<b>Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim</b>	<b>60,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>10,63</b>	<b>42,52</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>
						<b>Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi</b>	<b>40,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>36,67</b>	<b>366,70</b>	<b>16,66</b>	<b>36,66</b>	<b>91,65</b>
3	27	0 2	2 , 0 1		<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>									
3	27	0 2	2 , 0 1	0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi lokal	25 laporan					5,00	5,00	20,00
3	27	0 2	2 0 1	0 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani sasaran yang didampingi	3 kelompok					1,00	1,00	33,33

3	27	0 2	2 ,	2 0 2	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>										
3	27	0 2	2 ,	0 1 2	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian	10 paket					2,00	2,00	20,00	
3	27	0 2	2 ,	0 2 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	15 paket					3,00	3,00	20,00	
3	27	0 2	2 ,	0 5	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>										
3	27	0 2	2 ,	0 1 5	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	5 paket					2,00	2,00	40,00	
3	27	0 2	2 ,	0 6	<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain</i>										
3	27	0 2	2 ,	0 1 6	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/ Kota lain	50 paket					14,00	14,00	28,00	

3	27	03			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi</b>	0,00	N/ A	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
						<b>Persentase JUT yang berada di sentra produksi</b>	98,00	92,00	93,00	100,00	107,53	94,00	94,00	95,92
						<b>Persentase jalan produksi yang berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura</b>	92,00	80,00	82,00	84,00	102,44	84,00	84,00	91,30
						<b>Persentase tempat pemotongan hewan (ruminansia dan unggas) yang terstandar/tersertifikasi</b>	50,00	30,00	32,00	25,90	80,94	34,00	34,00	68,00
3	27	03	201		<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>									
3	27	03	201	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 dokumen					1,00	1,00	50,00

3	27	0 3	2 0 1	0 2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	30 dokumen						15,00	15,00	50,00
3	27	0 3	2 , 0 1	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	5 laporan						1,00	1,00	20,00
3	27	0 3	2 , 0 2		<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>										
3	27	0 3	2 0 2	0 1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	10 paket						2,00	2,00	20,00
3	27	0 3	2 , 0 2	0 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	100 paket						20,00	20,00	20,00
3	27	0 3	2 0 2	0 4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	10 paket						2,00	2,00	20,00
3	27	0 3	2 , 0 2	0 8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya	7 paket						2,00	2,00	28,57

						yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara								
3	27	03	2,02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	6 paket					1,00	1,00	16,67
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Persentase penyakit hewan menular strategis (PHMS)/ zoonosis yang ditangani</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
3	27	04	201	01	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>									
3	27	04	201	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	5 laporan					1,00	1,00	20,00
3	27	04	204		<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>									
3	27	04	204	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	5 laporan					1,00	1,00	20,00

3	27	044	202	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	10 laporan					2,00	2,00	20,00
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	27	05	201		<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>									
3	27	051	201	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	15 laporan					3,00	3,00	20,00
3	27	051	202	01	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani	15 laporan					3,00	3,00	20,00
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase usaha pertanian yang berizin</b>	<b>20,00</b>	<b>N/ A</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

3	27	0 6	2 0 2		<i>Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</i>									
3	27	0 6	2 0 2	0 1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	15 dokumen					3,00	3,00	20
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>07</b>	<b>07</b>		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase gapoktan aktif</b>	<b>75,00</b>	<b>N/ A</b>	<b>30,89</b>	<b>62,26</b>	<b>201,55</b>	<b>35,30</b>	<b>63,00</b>	<b>84,00</b>
						<b>Persentase kelompok tani aktif</b>	<b>75,00</b>	<b>N/ A</b>	<b>50,32</b>	<b>69,96</b>	<b>139,03</b>	<b>55,28</b>	<b>70,00</b>	<b>93,33</b>
						<b>Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang</b>	<b>60,00</b>	<b>20,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,00</b>	<b>34,00</b>	<b>56,67</b>
						<b>Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani</b>	<b>10,00</b>	<b>N/ A</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>20,00</b>
3	27	0 7	2 , 0 1		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>									

3	27	0 7	2 , 0 1	0 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	15 unit		15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00
3	27	0 7	2 0 1	0 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	10 unit		5,00	5,00	100,00	2,00	2,00	20,00
3	27	0 7	2 , 0 1	0 4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	10 unit		3	2	66,67	3,00	3,00	30,00

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupten Wonosobo mengampu 3 (tiga) urusan yaitu urusan pangan, sebagian urusan kelautan dan perikanan serta urusan pertanian. Dari ketiga urusan tersebut ada 32 indikator program yang harus dicapai setiap tahunnya, di mana urusan pangan terdiri dari 6 indikator program, urusan kelautan dan perikanan terdiri dari 5 indikator program serta urusan pertanian terdiri dari 22 indikator program.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renstra Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Capaian Renja Tahun 2022

Dari 33 indikator program di tahun 2021 secara umum menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik yaitu 26 indikator dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi (nilai 91-100%), 2 indikator berkinerja rendah ada di urusan pangan dan di urusan pertanian. Untuk urusan pangan indikator yang capaiannya rendah adalah persentase cadangan pangan. Kinerja indikator ini mengalami penurunan karena perubahan cara perhitungan yang digunakan.

Sedangkan kondisi eksisting dilapangan tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya. Sedangkan urusan pertanian pertanian dengan capaian kinerja rendah yaitu indikator persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim dimana capaian kinerja indikator ini hanya 42% dibanding target yang telah ditetapkan. Untuk indikator persentase gapoktan aktif yang pada tahun 2021 lalu capainnya rendah, pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Terdapat dua indikator yang perlu mendapat perhatian kedepan. Meskipun belum masuk kategori rendah tetapi perlu terus didorong peningkatan kinerjanya agar mendapat capaian kinerja yang lebih baik. Pertama, terkait capaian kinerja produksi tanaman pangan yang belum sesuai target yang meliputi produksi padi, jagung dan singkong. Dimana ketiga komoditas tersebut berdasarkan capaian kinerjanya mengalami penurunan kinerja. Padahal, komoditas tersebut merupakan strategis untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam situasi perubahan iklim yang berpotensi pada penurunan produksi bahan pangan, capaian kinerja tahun 2022 khususnya komoditas tanaman pangan perlu menjadi catatan dan perhatian bersama. Kedua untuk indikator persentase UPR aktif capaian kinerja baru 62% dibanding target. Capaian tersebut perlu menjadi pertimbangan

dalam menentukan strategi pengembangan UPR yang ada di wilayah Wonosobo. UPR merupakan salah satu sektor usaha yang terdampak langsung dari pandemi covid beberapa waktu lalu.

2) Capaian Renstra sampai dengan tahun 2024

Capaian kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 diasumsikan sama dengan target tahun 2023. Dari 33 indikator program pada tahun 2024 terdapat 19 indikator program berkinerja sangat tinggi (nilai 91-100%), 3 indikator berkinerja tinggi (nilai 76-90%), 1 indikator berkinerja sedang (nilai 66-75%), 8 indikator berkinerja rendah (nilai 51-65%) dan 1 indikator berkinerja sangat rendah (nilai 50% kebawah). Capaian kinerja tersebut bisa berubah seiring penetapan capaian indikator kinerja program pada akhir tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo sesuai dengan kewenangannya memiliki basis kinerja untuk memberikan pelayanan terkait urusan pangan, perikanan dan pertanian. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo mengacu pada indikator kinerja utama yang merupakan indikator sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2021-2026, yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel. 2**

**Pencapaian Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis (% capaian 2022)
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Skor PPH			87,32	87,38	87,53	87,68	87,70	88,6	87,53	87,68	100,44
2	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/th)			27,78	30,64	32,83	35,01	18,41	23,21	32,83	35,01	66,27
3	Produktivitas sektor pertanian (Rp. Juta)			36,60	38,09	39,64	41,25	38,97	36,75	39,64	41,25	106,49
4	Pertumbuhan petani ruta miskin yang dibina			25,00	20,00	16,67	14,29	0	27,77	16,67	14,29	-
5	Nilai SAKIP			74,88	74,90	75,00	75,25	70,20	71,21	75,10	75,25	93,75
6	Indeks Kepuasan Masyarakat			75,45	75,50	75,60	75,80	75,60	81,42	75,70	75,80	100,20

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja skor PPH pada tahun 2022 sebesar 88,60 dan capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 87,38. Pada indikator tingkat konsumsi ikan, capaian di tahun 2022 sebesar 23,1kg/kap/th, angka ini belum sesuai yang ditargetkan sebesar 30,64 kg/kap/th yang disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat Wonosobo tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan, belum terjangkau harga ikan konsumsi oleh masyarakat terutama masyarakat perdesaan serta kurang lancarnya distribusi/suplai ikan sampai ke perdesaan.

Untuk indikator produktivitas sektor pertanian capaian pada tahun 2022 sebesar Rp. 36,75 juta masih dibawah target dalam Renstra yaitu sebesar Rp. 38,09 juta. Artinya bahwa pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sebesar Rp. 36,75 juta per orang per tahun mengalami sedikit kenaikan dibanding realisasi tahun 2021.

Secara umum pencapaian realisasi kinerja pembangunan Dinas Pangan, Pertanian dan perikanan dari 6 (enam) indikator kinerja kunci, 3 (tiga) indikator sudah mencapai target sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya belum mencapai target. Kedepannya perlu adanya intervensi yang lebih fokus terhadap program-program yang mendukung pencapaian kinerja antara lain pengembangan benih ikan di BBI untuk mendukung peningkatan produksi, penguatan kelembagaan petani dan program lain yang relevan.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo terhadap target yang tercantum dalam Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 belum semuanya tercapai, beberapa indikator belum mencapai 100%. Dengan demikian masih terdapat isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang harus ditangani, yaitu:

- a. Masih tingginya konsumsi beras serta belum beragamnya pangan yang dikonsumsi masyarakat terutama di wilayah perdesaan.
- b. Belum intensifnya budidaya perikanan sebagai kegiatan ekonomi produktif guna menunjang peningkatan produksi perikanan dan meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat.
- c. Masih kurangnya akses petani terhadap benih/bibit yang berkualitas, pakan ternak serta teknologi budidaya pertanian.

- d. Belum adanya pusat layanan perbenihan, edukasi, penelitian yang sekaligus sebagai sarana wisata pertanian.
  - e. Masih banyaknya petani/buruh tani dalam kategori miskin.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2024 setelah mempertimbangkan kinerja Perangkat Daerah, dengan rancangan RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2024. Hasil review antara rancangan akhir Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2024 dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2024 menunjukkan perbedaan lampiran pada penetapan pagu indikatif sebagaimana tertera pada Tabel 3.

Tabel. 3

Pencapaian Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Renja 2024\_Dispaperkan Kab. Wonosobo

Rancangan Awal RKPD						Hasil analisa Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
<b>URUSAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>					<b>36.889.958.914</b>					<b>35.707.021.474</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				<b>353.197.096</b>					<b>355.000.000</b>	
	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>		<b>Rasio desa berlumbung pangan</b>	<b>9 %</b>	<b>100.209.834</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>		<b>Rasio desa berlumbung pangan</b>	<b>9 %</b>	<b>100.000.000</b>	
			<b>Persentase desa mandiri pangan</b>	<b>21,1 %</b>				<b>Persentase desa mandiri pangan</b>	<b>21,1 %</b>		

	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Desa yang memiliki infrasturktur kemandirian pangan	22 %	100.209.834	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Desa yang memiliki infrasturktur kemandirian pangan	22 %	100.000.000	
01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	19 Unit	55.000.000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	19 Unit	55.000.000	Untuk fasilitasi penyediaan lumbung pangan di desa rawan pangan
03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Infrastruktur Pendukung Kemandirian yang Tersedia	Unit		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Infrastruktur Pendukung Kemandirian yang Tersedia	Unit		

05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dok	45.209.834,0	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dok	45.000.000,0	Penyusunan dokumen Road Map Infrastruktur Kemandirian Pangan
	<b>Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</b>	<b>Ketersediaan pangan per kapita per hari (kilo kalori)</b>	<b>3000</b> kkal	<b>150.000.000</b>	<b>Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</b>	<b>Ketersediaan pangan per kapita per hari (kilo kalori)</b>	<b>3000</b> Kkal	<b>150.000.000</b>	
		<b>Persentase cadangan pangan utama (beras)</b>	<b>43</b> %			<b>Persentase cadangan pangan utama (beras)</b>	<b>43</b> %		

	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyediaan dan penyaluran pangan pokok kabupaten	100 %	50.000.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyediaan dan penyaluran pangan pokok kabupaten	100 %	50.000.000	
.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Lap	50.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Lap	50.000.000	Fasilitasi dan pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan cadangan pangan kabupaten	100 %	100.000.000	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Persentase pemenuhan cadangan pangan kabupaten	100 %	100.000.000	

						Kabupaten/Kota					
03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Ton	100.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Ton	100.000.000	
	<b>Program penanganan kerawanan pangan</b>		<b>Persentase desa berstatus rawan pangan</b>	<b>39 %</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Program penanganan kerawanan pangan</b>		<b>Persentase desa berstatus rawan pangan</b>	<b>39 %</b>	<b>50.000.000</b>	
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		Persentase data ketahanan dan kerentanan pangan yang di update	100 %	25.000.000	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		Persentase data ketahanan dan kerentanan pangan yang di update	100 %	25.000.000	

01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan anilasa ketahan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 Dok	25.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan anilasa ketahan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 Dok	25.000.000	Penyusunan dan analisis peta ketahanan dan kerawanan pangan kabupaten (di update setiap tahun)
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan penanganan kondisi rawan pangan kabupaten	100 %	25.000.000	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Cakupan penanganan kondisi rawan pangan kabupaten	100 %	25.000.000	
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4 Lap	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4 Lap	25.000.000	

	<b>Program pengawasan keamanan pangan</b>		<b>Persentase bahan pangan ASUH (aman, sehat, utuh dan halal)</b>	<b>93 %</b>	<b>52.987.262</b>	<b>Program pengawasan keamanan pangan</b>		<b>Persentase bahan pangan ASUH (aman, sehat, utuh dan halal)</b>	<b>93 %</b>	<b>55.000.000</b>	
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pengawas keamanan pangan segar daerah	100 %	52.987.262	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pengawas keamanan pangan segar daerah	100 %	55.000.000	
01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 D o k	32.987.262	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 D o k	35.000.000	

	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	80 Do k	20.000.000	Rekomen dasi Keamana n Pangan Segar Asal Tumbuha n Daerah Kabupate n/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	80 D o k	20.000.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>350.531.118</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>350.000.000</b>	
	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>		<b>Pertumbuhan produksi perikanan tangkap</b>	<b>2,95 %</b>	<b>40.759.432</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>		<b>Pertumbuhan produksi perikanan tangkap</b>	<b>2,95 %</b>	<b>40.000.000</b>	
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah		Persentase ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap	70 %	40.759.432	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat		Persentase ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap	70 %	40.000.000	

	Kabupaten/ Kota					Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	40.759.432		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Dok	40.000.000	Penyediaan Data dan informasi sumber daya ikan di Waduk Wadaslintang
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit		
	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Persentase kelompok tani ikan yang aktif</b>	<b>84,00 %</b>	<b>309.771.686</b>		<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Persentase kelompok tani ikan yang aktif</b>	<b>84,00 %</b>	<b>310.000.000</b>	
		<b>Persentase UPR aktif</b>	<b>87,50 %</b>				<b>Persentase UPR aktif</b>	<b>87,50 %</b>		

			<b>Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan</b>	<b>4,00 %</b>				<b>Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan</b>	<b>4,00 %</b>		
			<b>Pertumbuhan produksi perikanan budidaya</b>	<b>3,40 %</b>				<b>Pertumbuhan produksi perikanan budidaya</b>	<b>3,40 %</b>		
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitasnya	3 %	120.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitasnya	3 %	120.000.000	
01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	6 Kl p	120.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	6 Kl p	120.000.000	Fasilitasi dan pembinaan pembudidaya ikan kecil

03	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketersediaan data, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	70 %	189.771.686		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketersediaan data, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	70 %	190.000.000	

03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	109.771.686	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	110.000.000	Pengadaan produk ikan
				80.000.000				80.000.000	Penyediaan Benih Ikan Unggul
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			36.186.230.700	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			35.002.021.474	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100,00 %</b>	<b>29.784.012.881</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100,00 %</b>	<b>29.817.021.474</b>	

			<b>Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja</b>	<b>100,00 %</b>				<b>Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja</b>	<b>100,00 %</b>		
			<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100,00 %</b>				<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100,00 %</b>		
			<b>Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD</b>	<b>100,00 %</b>				<b>Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD</b>	<b>100,00 %</b>		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.000.000	

01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 Dok	-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 Dok	20.000.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	20.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.834.521.474		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.834.521.474	
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	27.834.521.474		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	27.834.521.474	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				478.680.028		Administrasi Umum Perangkat Daerah				470.000.000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bu lan	30.000.000	Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 B ul a n	30.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bu lan	100.000.000	Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan	12 B ul a n	100.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bu lan	78.680.028	Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	12 B ul a n	70.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Bu lan	15.000.000	Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 B ul a n	15.000.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	255.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	255.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 Paket	197.624.793	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 Paket	200.000.000	
	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	197.624.793	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				964.319.971	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				964.000.000	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	La p	12.000.000	Penyediaan n Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	L a p	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	La p	152.319.971	Penyediaan n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	L a p	152.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	La p	800.000.000	Penyediaan n Jasa Pelayana n Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	L a p	800.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				308.866.615	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah				308.500.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	150.366.615	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	150.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38.500.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	120.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	120.000.000	

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Produksi tanaman pangan		2.475.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi tanaman pangan		2.110.000.000
		- Padi	162.126 ton			- Padi	162.126 ton	
		- Jagung	78.529 ton			- Jagung	78.529 ton	
		- Ubi kayu	152.871 ton			- Ubi kayu	152.871 ton	
		- Ubi jalar	18.044 ton			- Ubi jalar	18.044 ton	
		Produksi tanaman hortikultura				Produksi tanaman hortikultura		
		- Bawang putih	3.727 ton			- Bawang putih	3.727 ton	
		- Kentang	53.636 ton			- Kentang	53.636 ton	
		- Kubis	58.916 ton			- Kubis	58.916 ton	
		- Sawi	11.089 ton			- Sawi	11.089 ton	

								9	n		
		- Bawang daun	36.183	ton				- Bawang daun	36.183	ton	
		- Cabe	21.785	ton				- Cabe	21.785	ton	
		- Durian	17.079	ton				- Durian	17.079	ton	
		- Salak	57.430	ton				- Salak	57.430	ton	
		- Duku/langsat	4.596	ton				- Duku/langsat	4.596	ton	
		- Manggis	1.024	ton				- Manggis	1.024	ton	
		- Nangka	5.573	ton				- Nangka	5.573	ton	
		- Pisang	48.627	ton				- Pisang	48.627	ton	
		- Pepaya	5.507	ton				- Pepaya	5.507	ton	
		- Nanas	385	ton				- Nanas	385	ton	
		Produksi tanaman biofarmaka						Produksi tanaman biofarmaka			

			- Jahe	117.929	ton				- Jahe	117.929	ton		
			- Kapulaga	317.089	ton				- Kapulaga	317.089	ton		
			Produksi bunga						Produksi bunga				
			- Krisan	2.660.719	ta ng kai				- Krisan	#####	ta n g k ai		
			- Mawar	30.738	ta ng kai				- Mawar	30.738	ta n g k ai		
			Produksi tanaman perkebunan						Produksi tanaman perkebunan				
			- Kelapa	4.800.341	ton				- Kelapa	#####	to n		
			- Kopi	587.359	ton				- Kopi	587.359	to n		
			Populasi ternak						Populasi ternak				
			- Sapi perah	1.528	ek or				- Sapi perah	1.528	e k or		

			- Sapi potong	22.173	ek or				- Sapi potong	22.173	e k or		
			- Kambing	206.425	ek or				- Kambing	206.425	e k or		
			- Domba	113.246	ek or				- Domba	113.246	e k or		
			- Unggas	2.978.083	ek or				- Unggas	#####	e k or		
			- Kelinci	53.142	ek or				- Kelinci	53.142	e k or		
			Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	10.000	ek or				Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	10.000	e k or		

		Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	40,00 %				Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	40,00 %		
		Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi	<b>23,33</b> %				Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi	<b>23,33</b> %		
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian	70 %	1.350.000.000	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian	70 %	1.035.000.000		

01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Dok	375.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Dok	260.000.000
		NTP Petani	1 Dok	125.000.000		NTP Petani	1 Dok	85.000.000
		Monitoring dan Data Statistik Pertanian	1 Dok	100.000.000		Monitoring dan Data Statistik Pertanian	1 Dok	75.000.000
		Percanaan T-1 Bidang Pertanian	1 Dok	150.000.000		Percanaan T-1 Bidang Pertanian	1 Dok	100.000.000

02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Lap	975.000.000		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Lap	775.000.000	
			Pengembangan benih asal bersertifikat pada tanaman padi	2500 Ha	100.000.000			Pengembangan benih asal bersertifikat pada tanaman padi	2500 Ha	100.000.000	
			Pendampingan unit pengolahan pupuk organik yang beroperasi	10 Unit	150.000.000			Pendampingan unit pengolahan pupuk organik yang beroperasi	10 Unit	100.000.000	
			Optimalisasi mekanisasi pertanian dalam budidaya padi	10 Ha	150.000.000			Optimalisasi mekanisasi pertanian dalam budidaya padi	10 Ha	100.000.000	
			Pendampingan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok	1 Dok	75.000.000			Pendampingan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok	1 Dok	75.000.000	

			Pengembangan dan pendampingan penangkar benih perkebunan dan hortikultura	6 unit	150.000.000,0			Pengembangan dan pendampingan penangkar benih perkebunan dan hortikultura	6 unit	150.000.000	
			Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam budidaya hortikultura		200.000.000,0			Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam budidaya hortikultura		150.000.000	
			Fasilitasi dan pengembangan penyediaan pakan ternak	1 DOK	150.000.000			Fasilitasi dan pengembangan penyediaan pakan ternak	1 DOK	100.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan		Persentase SDG Hewan/Tanaman yang ditingkatkan kualitas dan manfaatnya	40 %	825.000.000	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro		Persentase SDG Hewan/Tanaman yang ditingkatkan kualitas dan manfaatnya	40 %	775.000.000	

	Kabupaten/Kota				Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					
01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	6 VUB	575.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	6 VUB	525.000.000		
		Inseminasi buatan Domba Wonosobo	300 ekor	150.000.000		Inseminasi buatan Domba Wonosobo	250 ekor	100.000.000		
		Penjaringan ternak unggul Domba Wonosobo	275 ekor	150.000.000		Penjaringan ternak unggul Domba Wonosobo	275 ekor	150.000.000		
		Sertifikasi MPIG Domba Wonosobo	1 DOK	75.000.000		Sertifikasi MPIG Domba Wonosobo	1 DOK	75.000.000		

			Pengembangan Sumber Benih Lokal (Balai Benih Sariaji)	5 Varietas	100.000.000			Pengembangan Sumber Benih Lokal (Balai Benih Sariaji)	5 Varietas	100.000.000	
			Pengadaan ternak kecil (kambing, dombos, dll)	1 paket	100.000.000			Pengadaan ternak kecil (kambing, dombos, dll)	1 paket	100.000.000	
02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 DOK	250.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 DOK	250.000.000	
			Pembinaan dan pendampingan standarisasi dalam budidaya dan atau pasca panen komoditas tanaman pangan	1 Lapangan	100.000.000			Pembinaan dan pendampingan standarisasi dalam budidaya dan atau pasca panen komoditas tanaman pangan	1 Lapangan	100.000.000	

			Pembinaan dan pendampingan standarisasi dalam budidaya dan atau pasca panen komoditas perkebunan/ hortikultura	1 Lap	100.000.000			Pembinaan dan pendampingan standarisasi dalam budidaya dan atau pasca panen komoditas perkebunan/ hortikultura	1 Lap	100.000.000	
			Grading ternak unggul	1 Lap	50.000.000			Grading ternak unggul	1 Lap	50.000.000	
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan mutu benih/bibit dan pakan ternak	10 %	100.000.000		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan mutu benih/bibit dan pakan ternak	10 %	100.000.000	

01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan / Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	1 Lap	100.000.000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Lap	100.000.000
		Fasilitasi dan pengembangan penyediaan pakan ternak	2 Kelompok	100.000.000		Fasilitasi dan pengembangan penyediaan pakan ternak	2 Kelompok	100.000.000
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,5 %	200.000.000	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,5 %	200.000.000

01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan ternak unggul	40 Ekor	200.000.000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan ternak unggul	40 Ekor	200.000.000	
	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi</b>	<b>0 %</b>	<b>1.918.663.350</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi</b>	<b>0 %</b>	<b>2.175.000.000</b>	
		<b>Persentase JUT yang berada di sentra produksi</b>	<b>96 %</b>			<b>Persentase JUT yang berada di sentra produksi</b>	<b>96 %</b>		
		<b>Persentase jalan produksi yang berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura</b>	<b>88 %</b>			<b>Persentase jalan produksi yang berada di sentra/kawasan perkebunan dan</b>	<b>88 %</b>		

							<b>hortikultura</b>			
			<b>Persentase tempat pemotongan hewan (ruminansia dan unggas) yang terstandar/tersertifikasi</b>	<b>23,33 %</b>			<b>Persentase tempat pemotongan hewan (ruminansia dan unggas) yang terstandar/tersertifikasi</b>	<b>23,33 %</b>		
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		Pertumbuhan ketersediaan prasarana pertanian	4 %	120.000.000	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan ketersediaan prasarana pertanian	4 %	100.000.000	

01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang Dikelola	1 Dok	120.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang Dikelola	1 Dok	100.000.000	
		Penyusunan NA Perda LP2B	1 Dok	120.000.000		Penyusunan NA Perda LP2B	1 Dok	100.000.000	Kegiatan ini masuk penetapan 2022 tetapi terkena rasionalisasi anggaran
		Desiminasi dan penyebarluasan Perda		-		Desiminasi dan penyebarluasan Perda		-	

			LP2B					LP2B			
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		Pertumbuhan pembangunan prasarana pertanian	5 %	1.798.663.350	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		Pertumbuhan pembangunan prasarana pertanian	5 %	2.075.000.000	
01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	1 Unit	350.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	2 Unit	200.000.000	
03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	300.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	

04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	150.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	150.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	125.000.000	
07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	798.663.350	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	1.500.000.000,0	
	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		<b>Persentase penyakit hewan menular strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani</b>	<b>100 %</b>	<b>76.493.814</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		<b>Persentase penyakit hewan menular strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani</b>	<b>100 %</b>	<b>100.000.000</b>	

	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan kasus PHMS	20 %	76.493.814	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan kasus PHMS	20 %	100.000.000	
01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Lap	76.493.814	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Lap	100.000.000	

	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>		<b>Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani</b>	<b>100 %</b>	<b>1.729.952.240</b>	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>		<b>Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani</b>	<b>100 %</b>	<b>450.000.000</b>	
	Kegiatan. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Penurunan luas serangan OPT	8 %	1.729.952.240	Kegiatan. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Penurunan luas serangan OPT	8 %	450.000.000	

01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	75 Ha	1.729.952.240	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	75 Ha	450.000.000	
		Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	75 Ha	150.000.000		Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	75 Ha	150.000.000	

			Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	500 Ha	1.579.952.240			Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	500 Ha	300.000.000	
	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>		<b>Persentase usaha pertanian yang berizin</b>	<b>5 %</b>	<b>100.209.834</b>	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>		<b>Persentase usaha pertanian yang berizin</b>	<b>5 %</b>	<b>100.000.000</b>	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pertumbuhan izin usaha pertanian	1 %	100.209.834	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pertumbuhan izin usaha pertanian	1 %	100.000.000	
03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	3 Lap	100.209.834	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	3 Lap	100.000.000	

			Pembinaan dan pengawasan Usaha Pertanian Tanaman Pangan	30 Unit	30.209.834			Pembinaan dan pengawasan Usaha Pertanian Tanaman Pangan	30 Unit	30.000.000	
			Pembinaan dan pengawasan Usaha Pertanian Hortikultura dan Perkebunan	35 Unit	35.000.000			Pembinaan dan pengawasan Usaha Pertanian Hortikultura dan Perkebunan	35 Unit	35.000.000	
			Pembinaan dan pengawasan Usaha Peternakan	35 Unit	35.000.000			Pembinaan dan pengawasan Usaha Peternakan	35 Unit	35.000.000	
	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>		<b>Persentase gapoktan aktif</b>	<b>50 %</b>	<b>101.898.581</b>	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>		<b>Persentase gapoktan aktif</b>	<b>50 %</b>	<b>250.000.000</b>	
			<b>Persentase kelompok tani aktif</b>	<b>60 %</b>				<b>Persentase kelompok tani aktif</b>	<b>60 %</b>		

			<b>Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang</b>	<b>40,00 %</b>				<b>Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang</b>	<b>40,00 %</b>		
			<b>Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani</b>	<b>4 %</b>				<b>Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani</b>	<b>4 %</b>		
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	100 %	101.898.581	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	100 %	250.000.000	
01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	101.898.581	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	250.000.000	

			Pembentukan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	1 Unit	-			Pembentukan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	1 Unit	50.000.000	Kegiatan ini masuk penetapan 2022 namun di rasionalisasi
			Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian	15 BP P	25.000.000			Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian	15 BP P	75.000.000	
04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Unit	25.000.000	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Unit	50.000.000	Pembentukan badan usaha milik petani perlu pendampingan yang intensif
05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	51.898.581	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	75.000.000	Kegiatan ini masuk penetapan 2023 namun dirasionalisasi sehingga belum bisa dilaksanakan



## 2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2024, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang dirangkum Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, dapat dilihat dalam Tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2024 Kabupaten Wonosobo**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>				
	<b>Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>				
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Persentase ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah pengadaan ternak unggul		
		Desa Jlamprang, Kab.	Jumlah pengadaan ternak unggul	20 Ekor	Diterima Merupakan usulan yang di tujukan

		Wonosobo, Leksono			ke Dispaperkan melalui aplikasi SIPD-RI atas nama pengusul Sulaiman. Direncanakan untuk pengadaan bibit bagi kelompok sebanyak 20 ekor dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000 .
	Penyediaan bibit - ternak dombos	Desa Cledok, Kab. Wonosobo, Kaliwiro, Cledok	Jumlah pengadaan ternak unggul	20 Ekor	Diterima Merupakan usulan yang di tujukan ke Dispaperkan melalui aplikasi SIPD-RI atas nama pengusul Sugiman/Su giyanto. Direncanakan untuk pengadaan bibit bagi kelompok sebanyak 20 ekor dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000 .

**Sumber data : Hasil Usulan Masyarakat pada Musrenbang Kecamatan dan Sinkronisasi Forum Perangkat Daerah, diolah**

Sebagaimana terlihat pada tabel 4. untuk Tahun 2024 usulan hasil musrenbang kecamatan yang masuk ke Dispaperkan ada dua usulan dari dua kecamatan yakni Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Leksono. Dua usulan tersebut berupa penyediaan bibit ternak untuk kelompok. Usulan tersebut diterima karena selaras dengan program rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024. Dimana pada Renja Dispaperkan mengusulkan pengadaan bibit ternak dengan anggaran Rp. 200.000.000. untuk pengadaan bibit sebanyak 40 ekor.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO**

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 didasarkan pada Visi “Terwujudnya Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan 9 (sembilan) Misi pembangunan yang dikenal dengan Nawacita kedua. Strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah nasional, terdapat 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yang harus diperhatikan sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, sampai tahun 2023 tetap berupaya untuk mendukung terlaksananya prioritas Pembangunan Nasional, khususnya pada program memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan/perikanan. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo antara lain :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan yang ditunjukkan dengan meningkatnya produksi dan bertambahnya sertifikasi produk.
2. Peningkatan daya saing produk-produk pertanian dan perikanan, melalui pengelolaan pasca panen yang terstandar (sorting, sizing, grading, pengemasan).
3. Perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat, melalui meningkatnya skor PPH dan rata-rata konsumsi ikan.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tujuan Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, ada dua tujuan yaitu :

Tujuan 1 : meningkatkan pertumbuhan sektor dominan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatnya produktivitas sektor pertanian, meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya produksi perikanan, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, meningkatnya pelayanan publik.

Tujuan 2 : meningkatkan akses petani miskin/buruh tani terhadap ekonomi produktif dengan sasaran meningkatnya jumlah petani ruta miskin yang dibina.

Target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo merumuskan program dan kegiatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perumusan program dan kegiatan berpedoman pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya fokus untuk penanganan kemiskinan dan stunting, peningkatan SDM pertanian baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kemudahan saprodi bagi petani, peningkatan produksi dan peningkatan kualitas produk pertanian;
4. Sumber-sumber pendanaan yang ada dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 sebanyak 13 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eksrutin) dan 12 program pelaksanaan (eks-pembangunan);
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 sebanyak 24 kegiatan 50 sub kegiatan, yang terdiri dari 6

- kegiatan 18 sub kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin) dan 18 kegiatan 32 sub kegiatan pelaksanaan (eks-pembangunan);
3. Terdapat 2 kegiatan 2 sub kegiatan 2 pekerjaan yang terkait penanganan stunting yaitu:
    - a. Pembentukan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Desa Banyumudal, Kecamatan Sapuran dan Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kepil.
    - b. Kampanye gemarikan untuk mempromosikan konsumsi ikan di daerah/ desa-desa stunting.
  4. Terdapat 1 kegiatan 2 sub kegiatan 2 pekerjaan yang terkait dengan penanganan kemiskinan yaitu:
    - a. Pembentukan pos penyuluhan desa (Posluhdes) di desa Batusari Kecamatan Sapuran dan desa Wonosari Kecamatan Kalikajar.
    - b. Pembentukan sekolah lapang kelompok tani di desa Wonosari Kecamatan Kalikajar.
  5. Terdapat beberapa pekerjaan untuk mendukung kawasan sentra produksi pangan yang sebenarnya sudah direncanakan pada Tahun 2023 tetapi belum direalisasikan karena adanya penggeseran prioritas anggaran pada Tahun 2023 antara lain:
    - a. Penyediaan sarana pasca panen tanaman pangan (UPH) di desa Lamuk Kalikajar, Candimulyo Kertek, Mlandi Garung, Igrimranak Kejajar, Binangun Watumalang.
    - b. Penyediaan sarana pasca panen perkebunan di desa Lamuk Kalikajar, Candimulyo Kertek, Mlandi Garung, Igrimranak Kejajar, Binangun Watumalang.
    - c. Pengembangan dan pendampingan penangkar benih perkebunan/hortikultura di Kecamatan Kalikajar, Watumalang, Kertek, Garung, Kejajar.
    - d. Pembangunan/rehabilitasi irigasi pertanian pada kelompok tani Maju Bersama desa Tegalsari Garung, kelompok tani Tunas Muda desa Igrimranak Kejajar, kelompok tani Ngudi Hasil desa Wonosari Kalikajar.
    - e. Pembangunan jalan produksi (perkebunan) pada kelompok tani Regeng gayeng desa Menjer Garung, kelompok tani Macan Sumeh kelurahan Kejajar kecamatan Kejajar, kelompok tani Ngudi Mulyo desa Lamuk Kalikajar, kelompok tani Mekar Mandiri desa Candimulyo Kertek, kelompok tani Ngudi Rejeki desa Lumajang Watumalang.
    - f. Pembangunan jalan usaha tani hortikultura pada kelompok tani Lancar desa Gemblengan Garung, kelompok tani Maju Jaya desa Kreo Kejajar, kelompok tani Giri Tani desa Lamuk Kalikajar, kelompok tani Ngudi luhur desa Tlogomulyo Kertek, kelompok tani Sido Makmur desa Binangun Watumalang.
  6. Pada Tahun 2024, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo juga merencanakan pembangunan tiga gedung balai penyuluh pertanian yaitu, BPP Kepil, Kejajar dan Watumalang sebagai salah satu prioritas untuk [elayana penyuluhan di wilayah tersebut.

- a. Jumlah kebutuhan dana dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 sebesar Rp.

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
  - a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
  - a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
    - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  - b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Kota
    - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
    - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
3. Program penanganan kerawanan pangan
  - a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan
    - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
4. Program pengawasan keamanan pangan
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
    - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
    - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota
    - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pakan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
    - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
    - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha
- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    - Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
    - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
    - Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
    - Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
    - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
    - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
  - b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
  - c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil
  - d. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
    - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
    - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
    - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
    - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
    - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
    - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
    - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
10. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
11. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- a. Kegiatan. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
    - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
12. Program Perizinan Usaha Pertanian
- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
13. Program Penyuluhan Pertanian
- a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
    - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
    - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
    - Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
    - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Selengkapnya Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel 5.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN**  
**PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO**

Rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dalam Tabel berikut:

Tabel.5.

Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 20

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting		
			Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
<b>DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>					<b>35.707.021.474</b>				
2.	0 9 .	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>			<b>355.000.000</b>				
2.	0 9 .	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>		<b>9 %</b>	<b>100.000.000</b>				
				<b>21,1 %</b>					
2.	0 9 .	0 2 .	20 1	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang memiliki infrasturuktur kemandirian pangan	22 %	100.000.000		
2.	0 9 .	0 2 .	20 1 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	19 Uni t	55.000.000	PAD	Untuk fasilitasi penyediaan lumbung pangan di desa rawan pangan
2.	0 9 .	0 2 .	20 1 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Infrastruktur Pendukung Kemandirian yang Tersedia	Uni -			
5.	0 9 .	0 2 .	20 1 5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Do k	45.000.000,0	PAD	Penyusunan dokumen Road Map Infrastruktur Kemandirian Pangan

2.	0 9 .	0 3			<b>Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</b>	<b>Ketersediaan pangan per kapita per hari (kilo kalori)</b>		<b>3000</b> kka 1	<b>150.000.000</b>		
						<b>Persentase cadangan pangan utama (beras)</b>		<b>43</b> %			
2.	0 9 .	0 3	20 1		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyediaan dan penyaluran pangan pokok kabupaten		100 %	50.000.000		
2.	0 9 .	0 3	20 1	0 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		1 Lap	50.000.000	PAD	Fasilitasi dan pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari
2.	0 9 .	0 3	20 2		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan cadangan pangan kabupaten		100 %	100.000.000	PAD	
2.	0 9 .	0 3	20 2	0 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		6 Ton	100.000.000	PAD	Pengadaan cadangan pangan untuk antisipasi kondisi rawan pangan akibat bencana
2.	0 9 .	0 4			<b>Program penanganan kerawanan pangan</b>	<b>Persentase desa berstatus rawan pangan</b>		<b>39</b> %	<b>50.000.000</b>		
2.	0 9 .	0 4	20 1		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persentase data ketahanan dan kerentanan pangan yang di update		100 %	25.000.000		

2.	0 9 .	0 4	20 1	0 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan anilisa ketahan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	Kab. Won osob o	1 Do k	25.000.000	PAD	Penyusunan dan analisis peta ketahanan dan kerawanan pangan kabupaten (di update setiap tahu
2.	0 9 .	0 4	20 2		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan kondisi rawan pangan kabupaten		100 %	25.000.000		
2.	0 9 .	0 4	20 2	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kot a	Kab. Won osob o	4 Lap	25.000.000	PAD	Meningkatk n efektifitas penaganan kerawanan pangan kabupaten
2.	0 9 .	0 5			<b>Program pengawasan keamanan pangan</b>	<b>Persentase bahan pangan ASUH (aman, sehat, utuh dan halal)</b>		<b>93 %</b>	<b>55.000.000</b>		
2.	0 9 .	0 5	20 1		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawas keamanan pangan segar daerah		100 %	55.000.000		
2.	0 9 .	0 5	20 1	0 1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kot a yang Dibina		1 Do k	35.000.000	PAD	Mengoptim akan kinerja kelmbagaan keamanan pangan seg daerah
					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kot a		80 Do k	20.000.000	PAD	Meningkatk n ketersediaa pangan seg asal tumbuhan yang aman

3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>350.000.000</b>		
3	2	0			<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Pertumbuhan produksi perikanan tangkap</b>		<b>2,95</b> %	<b>40.000.000</b>		
3	2	0	2.		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap		70	40.000.000		
3	2	0	2.	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kot a yang Tersedia		1	40.000.000	PAD	Penyediaan Data dan informasi sumber day ikan di Waduk Wadaslinta g
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		0			
3	2	0			<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Persentase kelompok tani ikan yang aktif</b>		<b>84,0</b> % <b>0</b>	<b>310.000.000</b>		
						<b>Persentase UPR aktif</b>		<b>87,5</b> % <b>0</b>			
						<b>Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan</b>		<b>4,00</b> %			
						<b>Pertumbuhan produksi perikanan budidaya</b>		<b>3,40</b> %			
3	2	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitasnya		3	120.000.000		

3	2 5	0 4	2. 02	0 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	6 Klp	120.000.000	PAD	Fasilitasi da pembinaan pembudidaya ikan kecil
3	2 5	0 4	2. 02	0 3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
3	2 5	0 4	2. 04		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketersediaan data, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	70 %	190.000.000		
3	2 5	0 4	2. 04	0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	110.000.000	PAD	Pengadaan produk pakan ikan
								80.000.000	PAD	Penyediaan Benih Ikan Unggul
3	2 7				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			35.002.021.474		
3	2 7	1			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100, 00 %</b>	<b>29.817.021.474</b>		

							<b>Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja</b>		<b>100,00</b>	%			
							<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100,00</b>	%			
							<b>Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD</b>		<b>100,00</b>	%			
3	27	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					40.000.000		
3	27	1	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kab. Wonosobo</b>	<b>2,00</b>	Do k	20.000.000	PAD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	Do k	20.000.000	PAD	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.834.521.474		
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1	Tahun	27.834.521.474	PAD	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah					470.000.000		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	Bulan	30.000.000	PAD	

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	100.000.000	PAD	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	70.000.000	PAD	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	15.000.000	PAD	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	255.000.000	PAD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Paket	200.000.000	PAD	
				Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	PAD	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			964.000.000		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12.000.000	PAD	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	152.000.000	PAD	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	800.000.000	PAD	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			308.500.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	150.000.000	PAD	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38.500.000	PAD	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	120.000.000	PAD	
3	2	0		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Produksi tanaman pangan</b>		<b>2.110.000.000</b>		
					- Padi	162.126 ton			
					- Jagung	78.529 ton			
					- Ubi kayu	152.871 ton			
					- Ubi jalar	18.044 ton			
					Produksi tanaman hortikultura				

					- Bawang putih	3.727	ton			
					- Kentang	53.636	ton			
					- Kubis	58.916	ton			
					- Sawi	11.089	ton			
					- Bawang daun	36.183	ton			
					- Cabe	21.785	ton			
					- Durian	17.079	ton			
					- Salak	57.430	ton			
					- Duku/langsat	4.596	ton			
					- Manggis	1.024	ton			
					- Nangka	5.573	ton			
					- Pisang	48.627	ton			
					- Pepaya	5.507	ton			
					- Nanas	385	ton			
					Produksi tanaman biofarmaka					
					- Jahe	117.929	ton			
					- Kapulaga	317.089	ton			
					Produksi bunga					
					- Krisan	2.660.719	tan gka i			
					- Mawar	30.738	tan gka i			
					Produksi tanaman perkebunan					
					- Kelapa	4.800	ton			

								.341					
								- Kopi	587.359	ton			
								Populasi ternak					
								- Sapi perah	1.528	ekor			
								- Sapi potong	22.173	ekor			
								- Kambing	206.425	ekor			
								- Domba	113.246	ekor			
								- Unggas	2.978.083	ekor			
								- Kelinci	53.142	ekor			
								Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	10.000	ekor			
								Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	40,00	%			
								Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi	<b>23,33</b>	%			
3	2	0	2.				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian	70	%	1.035.000.000		

3	2	0	2.	0		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		3	Do k	260.000.000		
							NTP Petani		1	Do k	85.000.000	PAD	
							Monitoring dan Data Statistik Pertanian		1	Do k	75.000.000	PAD	
							Perencanaan T-1 Bidang Pertanian		1	Do k	100.000.000	PAD	
3	2	0	2.	0		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		3	Lap	775.000.000		
							Pengembangan benih asal bersertifikat pada tanaman padi		2500	Ha	100.000.000	PAD	
							Pendampingan unit pengolahan pupuk organik yang beroperasi		10	Uni t	100.000.000	PAD	
							Optimalisasi mekanisasi pertanian dalam budidaya padi		10	Ha	100.000.000	PAD	
							Pendampingan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok		1	Do k	75.000.000	PAD	

						Pengembangan dan pendampingan penangkar benih perkebunan dan hortikultura	6 unit	150.000.000	PAD	
						Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam budidaya hortikultura		150.000.000	PAD	
						Fasilitasi dan pengembangan penyediaan pakan ternak	1 DOK	100.000.000	PAD	
3	2	0	2.			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	40 %	775.000.000		
3	2	0	2.	0		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	6 VUB	525.000.000		
						Inseminasi buatan Domba Wonosobo	300 ekor	100.000.000	PAD	
						Penjaringan ternak unggul Domba Wonosobo	275 ekor	150.000.000	PAD	
						Sertifikasi MPIG Domba Wonosobo	1 DOK	75.000.000	PAD	
						Pengembangan Sumber Benih Lokal (Balai Benih Sariaji)	5 Varitas	100.000.000	PAD	

						Pengadaan ternak kecil (kambing, dombos, dll)		1 paket	100.000.000	PAD	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		3 Dok	250.000.000		
						Pembinaan dan pendampingan standarisasi dalam budidaya dan atau pasca panen komoditas tanaman pangan		1 Lap	100.000.000	PAD	
						Pembinaan dan pendampingan standarisasi dalam budidaya dan atau pasca panen komoditas perkebunan/hortikultura		1 Lap	100.000.000	PAD	
						Grading ternak unggul		1 Lap	50.000.000	PAD	
3	27	02	2.03		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan mutu benih/bibit dan pakan ternak		10 %	100.000.000		
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		1 Lap	100.000.000	PAD	
						Fasilitasi dan pengembangan penyediaan pakan ternak		2 Kelompok	100.000.000	PAD	

3	2	0	2.		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,5 %	200.000.000		
3	2	0	2.	0	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan ternak unggul	40 Ekor	200.000.000	PAD	
3	2	0			<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi</b>	<b>0 %</b>	<b>2.175.000.000</b>		
						<b>Persentase JUT yang berada di sentra produksi</b>	<b>96 %</b>			
						<b>Persentase jalan produksi yang berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura</b>	<b>88 %</b>			
						<b>Persentase tempat pemotongan hewan (ruminansia dan unggas) yang terstandar/tersertifikasi</b>	<b>23,33 %</b>			
3	2	0	2.		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan ketersediaan prasarana pertanian	4 %	100.000.000		

3	2	0	2.	0	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1	Do k	100.000.000		
						Penyusunan NA Perda LP2B		1	Do k	100.000.000	PAD
						Desiminasi dan penyebarluasan Perda LP2B				-	
3	2	0	2.	0	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan pembangunan prasarana pertanian	5	%	2.075.000.000		
3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun/ direhabilitasi/ dipelihara	2	Uni t	200.000.000		PAD
3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Uni t	100.000.000		PAD
3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Uni t	150.000.000		PAD
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Uni t	125.000.000		PAD

3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	1.500.000.000	PAD	
3	2	0			<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase penyakit hewan menular strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani</b>	<b>100 %</b>	<b>100.000.000</b>		
3	2	0	2.		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan kasus PHMS	20 %	100.000.000		
3	2	0	2.	0	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Lap	100.000.000		
3	2	0			<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani</b>	<b>100 %</b>	<b>450.000.000</b>		
3	2	0	2.		Kegiatan. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penurunan luas serangan OPT	8 %	450.000.000		

3	2	0	2.	0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	75 Ha	450.000.000		
						Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	75 Ha	150.000.000	PAD	
						Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	150 Ha	300.000.000	PAD	
3	2	0			<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Persentase usaha pertanian yang berizin</b>	<b>5 %</b>	<b>100.000.000</b>		
3	2	0	2.	01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan izin usaha pertanian	1 %	100.000.000		
3	2	0	2.	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	3 Lap	100.000.000		
						Pembinaan dan pengawasan Usaha Pertanian Tanaman Pangan	30 Unit	30.000.000	PAD	

						Pembinaan dan pengawasa Usaha Pertanian Hortikultura dan Perkebunan		35 Unit	35.000.000	PAD		
						Pembinaan dan pengawasan Usaha Peternakan		35 Unit	35.000.000	PAD		
3	2	0			<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase gapoktan aktif</b>		<b>50 %</b>	<b>250.000.000</b>			
						<b>Persentase kelompok tani aktif</b>		<b>60 %</b>				
						<b>Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang</b>		<b>40,00 %</b>				
						<b>Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani</b>		<b>4 %</b>				
3	2	0	2.		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian		100 %	250.000.000			
3	2	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		15 Unit	250.000.000			
						Pembentukan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)		1 Unit	50.000.000	PAD		
						Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian		15 BP P	75.000.000	PAD		

3	2	0	2.	0	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk		2 Unit	50.000.000	PAD	
3	2	0	2.	0	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		2 Unit	75.000.000	PAD	

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024

Kode Renja 2024_Dispa					Program/Kegiatan/Su	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
					perkan Kab. Monosobo Kegiatan					
<b>DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>									<b>35.707.021.474</b>	
2.	09				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				<b>355.000.000</b>	
2.	09	0			<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>	<b>Rasio desa berlambung pangan</b>		<b>9 %</b>	<b>100.000.000</b>	
						<b>Persentase desa mandiri pangan</b>		<b>21,1 %</b>		
2.	09	0	2	0	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang memiliki infrasturuktur kemandirian pangan		22 %	100.000.000	
2.	09	0	2	0	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia		19 Unit	55.000.000	PAD
2.	09	0	2	0	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Infrastruktur Pendukung Kemandirian yang Tersedia		- Unit		
5.	09	0	2	0	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		1 Dok	45.000.000,0	PAD
2.	09	0			<b>Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</b>	<b>Ketersediaan pangan per kapita per hari (kilo kalori)</b>		<b>3000 kkal</b>	<b>150.000.000</b>	
						<b>Persentase cadangan pangan utama (beras)</b>		<b>43 %</b>		

2.	09	0	2		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyediaan dan penyaluran pangan pokok kabupaten		100 %	50.000.000	
2.	09	0	2	.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		1 Lap	50.000.000	PAD
2.	09	0	2		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan cadangan pangan kabupaten		100 %	100.000.000	PAD
2.	09	0	2	0	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		6 Ton	100.000.000	PAD
2.	09	0			<b>Program penanganan kerawanan pangan</b>	<b>Persentase desa berstatus rawan pangan</b>		<b>39 %</b>	<b>50.000.000</b>	
2.	09	0	2		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persentase data ketahanan dan kerentanan pangan yang di update		100 %	25.000.000	
2.	09	0	2	0	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan anilasa ketahan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	Ka b. Wo nos obo	1 Dok	25.000.000	PAD
2.	09	0	2		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan kondisi rawan pangan kabupaten		100 %	25.000.000	

2.	09	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Ka b. Wo nos obo	4 Lap	25.000.000	PAD
2.	09	0			<b>Program pengawasan keamanan pangan</b>	<b>Persentase bahan pangan ASUH (aman, sehat, utuh dan halal)</b>		<b>93 %</b>	<b>55.000.000</b>	
2.	09	0	2	0	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawas keamanan pangan segar daerah		100 %	55.000.000	
2.	09	0	2	0	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina		1 Dok	35.000.000	PAD
					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		80 Dok	20.000.000	PAD
3	25				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>350.000.000</b>	
3	25	0			<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Pertumbuhan produksi perikanan tangkap</b>		<b>2,95 %</b>	<b>40.000.000</b>	
3	25	0	2	0	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam	Persentase ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap		70 %	40.000.000	

					1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
3	25	0 3	2 . 0 1	0 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dok	40.000.000	PAD
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		0 Unit		
3	25	0 4			<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Persentase kelompok tani ikan yang aktif</b>		<b>84,00</b> %	<b>310.000.000</b>	
						<b>Persentase UPR aktif</b>		<b>87,50</b> %		
						<b>Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan</b>		<b>4,00</b> %		
						<b>Pertumbuhan produksi perikanan budidaya</b>		<b>3,40</b> %		
3	25	0 4	2 . 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitasnya		3 %	120.000.000	
3	25	0 4	2 . 0 2	0 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas		6 Klp	120.000.000	PAD

3	25	0 4	2 . 0 2	0 3	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
3	25	0 4	2 . 0 4		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketersediaan data, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	70 %	190.000.000		
3	25	0 4	2 . 0 4	0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	110.000.000	PAD	
								80.000.000	PAD	
3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			35.002.021.474		
3	27	1			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100,00 %</b>	<b>29.817.021.474</b>		
						<b>Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja</b>	<b>100,00 %</b>			
						<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100,00 %</b>			

						<b>Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD</b>		<b>100,00</b> %		
3	27	1	2 . 0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.000.000	
3	27	1	2 . 0 1	0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Ka b. Wo nos obo</b> <b>2,00</b> Dok	20.000.000	PAD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	20.000.000	PAD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.834.521.474	
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	27.834.521.474	PAD
						Administrasi Umum Perangkat Daerah			470.000.000	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	30.000.000	PAD
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	100.000.000	PAD

					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bula n	70.000.000	PAD
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Bula n	15.000.000	PAD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bula n	255.000.000	PAD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 Pak et	200.000.000	PAD
					Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Pak et	200.000.000	PAD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				964.000.000	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Lap	12.000.000	PAD
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Lap	152.000.000	PAD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		Lap	800.000.000	PAD

						Disediakan				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			308.500.000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	150.000.000	PAD
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38.500.000	PAD
						Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	120.000.000	PAD
3	27	0	2			<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Produksi tanaman pangan</b>		<b>2.110.000.000</b>	
							- Padi		162.12 6	ton
							- Jagung		78.529	ton
							- Ubi kayu		152.87 1	ton
							- Ubi jalar		18.044	ton
							Produksi tanaman hortikultura			
							- Bawang putih		3.727	ton

						- Kentang	53.636	ton		
						- Kubis	58.916	ton		
						- Sawi	11.089	ton		
						- Bawang daun	36.183	ton		
						- Cabe	21.785	ton		
						- Durian	17.079	ton		
						- Salak	57.430	ton		
						- Duku/langsat	4.596	ton		
						- Manggis	1.024	ton		
						- Nangka	5.573	ton		
						- Pisang	48.627	ton		
						- Pepaya	5.507	ton		
						- Nanas	385	ton		
						Produksi tanaman biofarmaka				
						- Jahe	117.929	ton		
						- Kapulaga	317.089	ton		
						Produksi bunga				
						- Krisan	2.660.719	tangkai		
						- Mawar	30.738	tangkai		
						Produksi tanaman perkebunan				
						- Kelapa	4.800.341	ton		
						- Kopi	587.359	ton		
						Populasi ternak				
						- Sapi perah	1.528	ekor		
						- Sapi potong		ekor		

							22.173		
						- Kambing	206.425 ekor		
						- Domba	113.246 ekor		
						- Unggas	2.978.083 ekor		
						- Kelinci	53.142 ekor		
						Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	10.000 ekor		
						Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	40,00 %		
						Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi	<b>23,33</b> %		
3	27	02	201		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian	70 %	1.035.000.000	

3	27	0 2	2 . 0 1	0 1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		3 Dok	260.000.000	
							NTP Petani		1 Dok	85.000.000	PAD
							Monitoring dan Data Statistik Pertanian		1 Dok	75.000.000	PAD
							Percanaan T-1 Bidang Pertanian		1 Dok	100.000.000	PAD
3	27	0 2	2 . 0 1	0 2		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		3 Lap	775.000.000	
							Pengembangan benih asal bersertifikat pada tanaman padi		2500 Ha	100.000.000	PAD
							Pendampingan unit pengolahan pupuk organik yang beroperasi		10 Unit	100.000.000	PAD
							Optimalisasi mekanisasi pertanian dalam budidaya padi		10 Ha	100.000.000	PAD
							Pendampingan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok		1 Dok	75.000.000	PAD

						Pengembangan dan pendampingan penangkaran benih perkebunan dan hortikultura	6 unit	150.000.000	PAD
						Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam budidaya hortikultura		150.000.000	PAD
						Fasilitasi dan pengembangan penyediaan pakan ternak	1 Dok	100.000.000	PAD
3	27	0 2	2 . 0 2		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDG Hewan/Tanaman yang ditingkatkan kualitas dan manfaatnya	40 %	775.000.000	
3	27	0 2	2 . 0 2	0 1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	6 VUB	525.000.000	
						Inseminasi buatan Domba Wonosobo	300 ekor	100.000.000	PAD
						Penjaringan ternak unggul Domba Wonosobo	275 ekor	150.000.000	PAD
						Sertifikasi MPIG Domba Wonosobo	1 Dok	75.000.000	PAD
						Pengembangan Sumber Benih Lokal (Balai Benih Sariaji)	5 Varietas	100.000.000	PAD

						Pengadaan ternak kecil (kambing, dombos, dll)		1 paket	100.000.000	PAD
3	27	0 2	2 . 0 2	0 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		3 Dok	250.000.000	
						Pembinaan dan pendampingan standarisasi dalam budidaya dan atau pasca panen komoditas tanaman pangan		1 Lap	100.000.000	PAD
						Pembinaan dan pendampingan standarisasi dalam budidaya dan atau pasca panen komoditas perkebunan/hortikultura		1 Lap	100.000.000	PAD
						Grading ternak unggul		1 Lap	50.000.000	PAD
3	27	0 2	2 . 0 3		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan mutu benih/bibit dan pakan ternak		10 %	100.000.000	
3	27	0 2	2 . 0 3	0 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		1 Lap	100.000.000	PAD

						Fasilitasi dan pengembangan penyediaan pakan ternak		2 Kelo mpo k	100.000.000	PAD
3	27	0 2	2 . 0 6			Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,5 %	200.000.000	
3	27	0 2	2 . 0 6	0 1		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan ternak unggul	40 Eko r	200.000.000	PAD
3	27	0 3				<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi</b>	<b>0 %</b>	<b>2.175.000.000</b>	
							<b>Persentase JUT yang berada di sentra produksi</b>	<b>96 %</b>		
							<b>Persentase jalan produksi yang berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura</b>	<b>88 %</b>		
							<b>Persentase tempat pemotongan hewan (ruminansia dan unggas) yang terstandar/tersertifikasi</b>	<b>23,33 %</b>		

3	27	0 3	2 . 0 1		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan ketersediaan prasarana pertanian	4 %	100.000.000	
3	27	0 3	2 . 0 1	0	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	1 Dok	100.000.000	
						Penyusunan NA Perda LP2B	1 Dok	100.000.000	PAD
						Desiminasi dan penyebarluasan Perda LP2B		-	
3	27	0 3	2 . 0 2		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan pembangunan prasarana pertanian	5 %	2.075.000.000	
3	27	0 3	2 . 0 2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun/ direhabilitasi / dipelihara	2 Unit	200.000.000	PAD
3	27	0 3	2 . 0 2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	PAD
3	27	0 3	2 . 0 2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	150.000.000	PAD

					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	125.000.000	PAD
3	27	0 3	2 . 0 2	0 7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		3 Unit	1.500.000.000	PAD
3	27	0 4			<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase penyakit hewan menular strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani</b>		<b>100 %</b>	<b>100.000.000</b>	
3	27	0 4	2 . 0 1		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan kasus PHMS		20 %	100.000.000	
3	27	0 4	2 . 0 1	0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		1 Lap	100.000.000	
3	27	0 5			<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani</b>		<b>100 %</b>	<b>450.000.000</b>	
3	27	0 5	2 . 0 1		Kegiatan. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Penurunan luas serangan OPT		8 %	450.000.000	

					Perkebunan					
3	27	0 5	2 . 0 1	0 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	75 Ha	450.000.000		
						Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	75 Ha	150.000.000		PAD
						Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	150 Ha	300.000.000		PAD
3	27	0 6			<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Persentase usaha pertanian yang berizin</b>	<b>5 %</b>	<b>100.000.000</b>		
3	27	0 6	2 . 0 1		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan izin usaha pertanian	1 %	100.000.000		
3	27	0 6	2 . 0 1	0 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	3 Lap	100.000.000		
						Pembinaan dan pengawasan Usaha Pertanian Tanaman Pangan	30 Unit	30.000.000		PAD

						Pembinaan dan pengawasa Usaha Pertanian Hortikultura dan Perkebunan	35 Unit	35.000.000	PAD
						Pembinaan dan pengawasan Usaha Peternakan	35 Unit	35.000.000	PAD
3	27	07			<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase gapoktan aktif</b>	<b>50 %</b>	<b>250.000.000</b>	
						<b>Persentase kelompok tani aktif</b>	<b>60 %</b>		
						<b>Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang</b>	<b>40,00 %</b>		
						<b>Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani</b>	<b>4 %</b>		
3	27	07	201		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	100 %	250.000.000	
3	27	07	201	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	250.000.000	
						Pembentukan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	1 Unit	50.000.000	PAD

						Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian		15 BPP	75.000.000	PAD
3	27	07	201	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk		2 Unit	50.000.000	PAD
3	27	07	201	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Lapangan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		2 Unit	75.000.000	PAD

Sumber: Diolah dari Renstra Dispaperka Tahun 2021-2026

## **BAB V PENUTUP**

Rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 disusun sebagai acuan dan pedoman operasional bagi semua pihak dan *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan peran masing-masing, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien. Di samping itu juga sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja serta dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2024.

Rencana kerja ini bersifat indikatif sehingga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan aturan maupun kebijakan yang baru dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Wonosobo, Januari 2024

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Wonosobo



**Ir. DWIYAMA SATYANI BUDYAYU, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196701021994031010